



Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Denpasar

Luh Ayu Ellyana Aripuspita *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Ni Wayan Supriyanti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: * ellyanaaripuspita@gmail.com

Abstract

The Denpasar City Social Service has duties in the field of social welfare. The purpose to be achieved in this study is to analyze the strategies applied by the Denpasar City Social Service in handling Socio-Economically Vulnerable Women. The research method uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques through interviews, observations and documents. The theory used in this research is the Theory of Strategic Management from Wheelen and Hunger which consists of (1) Environmental Scanning, (2) Strategy Formulation, (3) Strategy Implementation, (4) Evaluation and Control. The results of this study indicate that the Strategy carried out by the Social Service is not optimal which can be seen from several indicators, namely Environmental Scanning and Evaluation & Control, this is because there has been no maximum effort made to take advantage of existing strengths and opportunities and no effort to overcome weaknesses and threats. These problems were re-analyzed using SWOT by Freddy Rangkuti which consists of (1) Strengths, (2) Weaknesses, (3) Opportunities, (4) resulting in a strategy with programs/activities in the form of: (1) forming joint business groups (KUBE) or small cooperatives that can sell products at local events, (2) holding PRSE Expo (Mini Local Bazaar) programs, (3) providing digital marketing training, (4) holding mobile micro training programs/activities.

Keywords: Socioeconomically Vulnerable Women, Welfare, SWOT, Strategic Management

Abstrak

Dinas Sosial Kota Denpasar mempunyai tugas di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dalam penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Manajemen Strategi dari Wheelen and Hunger yang terdiri dari (1) Pemindaian Lingkungan, (2) Formulasi Strategi, (3) Implementasi Strategi, (4) Evaluasi dan Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum optimal yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Pemindaian Lingkungan serta Evaluasi & Pengendalian hal ini dikarenakan belum adanya upaya maksimal yang dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta tidak adanya upaya untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Permasalahan tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan SWOT oleh Freddy Rangkuti yang terdiri dari (1) *Strengths*, (2) *Weakness*, (3) *Opportunities*, (4) *Threats* sehingga menghasilkan strategi dengan program/kegiatan berupa: (1) membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) atau koperasi kecil yang bisa menjual produk di event lokal, (2) mengadakan program PRSE Expo (Mini Bazar Lokal), (3) memberikan pelatihan pemasaran digital, (4) mengadakan program/kegiatan pelatihan mikro keliling.

Kata Kunci: Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Kesejahteraan, SWOT, Manajemen Strategi



I. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, kemiskinan juga memengaruhi kualitas hidup, akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang partisipasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sementara, melainkan

memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menjadi fokus pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk membangkitkan potensi individu maupun kelompok agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara berkelanjutan untuk masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan karakteristik masyarakat tersebut. Salah satu bentuk inisiatif dalam pemberdayaan sosial diwujudkan melalui program yang ditujukan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan pemberian dana stimulan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kelompok masyarakat miskin yang menjadi fokus inisiatif pemberdayaan sosial ini adalah perempuan kepala keluarga.

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin perlu dilakukan pemberdayaan sosial agar dapat meningkatkan fungsi sosial, sehingga mereka dapat melakukan peran-peran sosial dalam masyarakat dengan harapan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tidak diperlakukan secara setara dalam kehidupan sosialnya, dapat mengakibatkan ketimpangan sosial yang berujung pada kesenjangan kedudukan sosial dalam masyarakat. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan meningkatnya angka kejahatan. Selain itu, kemiskinan menimbulkan rasa ketidakberdayaan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

Marwati & Astuti (2011) dalam Purnama, (2018) sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga berpendapatan rendah sering kali berperan sebagai penyelamat ekonomi keluarga. Pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan perempuan merupakan proses memanfaatkan kemampuan yang ada dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka menjadi lebih layak tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah (Fadlullah, 2018). Akibatnya, dalam proses pembangunan perempuan dapat memperkuat peran sosial mereka secara tidak langsung maupun secara langsung. Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Tabel 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2024

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	14,24	15,00	14,12	12,90
Kota Denpasar	29,41	30,02	27,69	27,27
Kab. Gianyar	25,36	24,74	23,76	21,45
Kab. Bangli	11,68	12,17	12,24	11,79
Kab. Badung	18,52	18,28	17,01	16,87
Kab. Karangasem	28,52	29,45	27,83	27,76
Kab. Tabanan	23,11	23,46	21,42	20,16
Kab. Klungkung	10,19	10,89	10,22	9,68
Kab. Buleleng	40,92	41,68	39,52	36,55
Provinsi Bali	201,97	205,68	193,78	184,43

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024)

Menurut data dari BPS, jumlah penduduk yang berada dalam kategori miskin di Provinsi Bali secara keseluruhan meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali, yaitu sebesar 36,55%, Kemudian Kabupaten Karangasem di peringkat kedua dengan jumlah sebanyak 27,76% dan peringkat ketiga yaitu Kota Denpasar dengan penduduk miskin berjumlah 27,27% yang nilainya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Karangasem. Kelompok penduduk yang tergolong Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah kelompok yang ditetapkan Dinas Sosial sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Perorangan, kelompok, masyarakat atau keluarga yang mengalami gangguan, hambatan, atau tantangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan kewajiban sosialnya disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya secara memadai, mereka memerlukan pelayanan sosial. Mengacu pada Permensos No. 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 kategori penerima PMKS yaitu perempuan rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, korban tindak kekerasan usia 18 tahun ke atas, fakir miskin, balita terlantar, anak jalanan, korban napza, anak berhadapan dengan hukum, komunitas adat terpencil, keluarga bermasalah sosial psikologis, kelompok minoritas, bekas warga lapas/bwblp, odha, korban *human trafficking* atau korban perdagangan orang, anak memerlukan perlindungan khusus lainnya, pekerja migran bermasalah, korban tuna susila, anak tindak korban kekerasan, korban bencana/guncangan ekonomi, korban bencana sosial, pemulung, gelandangan, anak dengan disabilitas, pengemis, anak terlantar, lansia terlantar.

Tabel 2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) provinsi Bali

Kabupaten	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Bali	
	2023	2024
Kab. Jembrana	95.933	90.879
Kota Denpasar	193.523	160.001
Kab. Gianyar	185.337	165.256
Kab. Bangli	89.678	82.122
Kab. Badung	124.237	106.494
Kab. Karangasem	271.703	258.703
Kab. Tabanan	192.822	180.555
Kab. Klungkung	75.960	71.412
Kab. Buleleng	211.624	185.835
Provinsi Bali	1.440.817	1.301.257

(Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2025)

Berdasarkan data dari Satu Data Indonesia Provinsi Bali kota Denpasar berada dalam urutan ke-3 tertinggi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah karangasem dan Buleleng yang mencapai pada angka 200.000 pada tahun 2023 tetapi terjadi perubahan pada tahun 2024 dimana kota Denpasar turun ke urutan ke-5 dengan jumlah DTKS 160.001 orang.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dalam adalah kesejahteraan perempuan, hal tersebut dikarenakan secara umum kesejahteraan perempuan dapat menjadi indikator dan jaminan bagi kesejahteraan kelompok lain yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. PRSE adalah perempuan yang telah menikah, belum menikah atau berstatus janda, yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Tabel 3. Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Denpasar tahun 2020-2023

2020	2021	2022	2023
182	268	305	309

(Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2024)

Kota Denpasar merupakan Kabupaten/Kota yang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, dibandingkan angka PRSE pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 mencapai 182 jiwa, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai 268 jiwa, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan hingga 305 jiwa. Dinas Sosial berperan krusial sebagai organisasi yang membidangi inisiatif kesejahteraan sosial. Itulah sebabnya mereka melaksanakan Pemberdayaan terhadap PRSE.

Manajemen strategis merupakan konsep penting dalam mengelola organisasi agar mampu mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), manajemen strategis adalah serangkaian pilihan dan tindakan yang diperlukan dalam menyusun rencana yang berhasil guna mencapai tujuan bisnis, melalui pendekatan analisis SWOT—yang mencakup kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats). Proses ini membantu organisasi dalam merumuskan target yang ingin dicapai serta menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan. Sejalan dengan itu, Taufiqurokhman (2016) menyatakan bahwa manajemen strategis mencakup berbagai keputusan dan tindakan yang berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang suatu organisasi, dimulai dari analisis lingkungan hingga pengendalian dan evaluasi strategi yang diterapkan. Dalam praktiknya, organisasi harus memahami konteks eksternal dan internalnya guna merumuskan strategi yang tepat dan relevan. Tangkilisan (2003) menekankan bahwa pemahaman lingkungan organisasi menjadi landasan dalam merumuskan isu strategis serta penerapan strategi guna mencapai misi dan tujuan organisasi.

Manajemen strategis berperan penting dalam mendeteksi variabel strategis dan menentukan alternatif strategi secara sistematis. Dirgantoro (2001) menyebutkan bahwa manajemen strategis memiliki berbagai keunggulan, di antaranya sebagai sarana komunikasi tujuan, penunjuk arah, alat eksploitatif terhadap peluang, pengendali perubahan, serta kerangka koordinasi, pengambilan keputusan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Teori manajemen strategis dari Hunger dan Wheelen sangat relevan karena pendekatannya bersifat komprehensif, terstruktur, dan mencakup seluruh tahapan mulai dari pemindaian lingkungan, perumusan strategi, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini memungkinkan organisasi, termasuk instansi pemerintah seperti Dinas Sosial di Kota Denpasar, untuk memahami kondisi internal-eksternal serta menyusun strategi yang relevan dan aplikatif guna memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE).

Dalam kerangka yang lebih operasional, model manajemen strategis menurut Wheelen dan Hunger (2003:8) terdiri dari empat komponen utama, yakni pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Pada tahap awal, pemindaian lingkungan dilakukan untuk menilai kondisi internal dan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan seperti struktur organisasi, budaya, serta sumber daya, sementara lingkungan eksternal mencakup peluang dan ancaman dari aspek yang berdampak langsung (lingkungan kerja) maupun tidak langsung (lingkungan sosial dan budaya). Proses ini bertujuan mengenali variabel strategis dalam konteks SWOT agar strategi yang dirumuskan responsif terhadap perubahan.

Perumusan strategi mencakup penyusunan visi, misi, tujuan, strategi, serta kebijakan. Visi menggambarkan arah ideal masa depan organisasi, sedangkan misi menjelaskan tujuan utama keberadaannya. Tujuan berfungsi sebagai perwujudan konkret dari visi jangka menengah, strategi sebagai langkah besar menuju pencapaian tujuan, dan kebijakan sebagai pedoman pengambilan keputusan. Selanjutnya, implementasi strategi dilakukan melalui penyusunan program, anggaran, dan prosedur operasional yang secara praktis merealisasikan strategi ke dalam aktivitas organisasi. Terakhir, proses evaluasi dan pengendalian berfungsi menilai kesesuaian hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Dalam penyusunan strategi, analisis SWOT menjadi alat penting untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal organisasi. Galavan (2014) menyatakan bahwa SWOT digunakan untuk meneliti peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi, guna menentukan strategi yang efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Rangkuti (2006) mendefinisikan kekuatan sebagai keunggulan kompetitif organisasi, sementara kelemahan merujuk pada keterbatasan yang dapat menghambat efektivitas organisasi. Peluang adalah kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, dan ancaman merupakan faktor luar yang dapat menggoyahkan keberlangsungan organisasi. Untuk melengkapi analisis tersebut, Fahmi (2014) menekankan pentingnya memahami unsur eksternal seperti kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi, serta unsur internal seperti SDM, pemasaran, keuangan, dan sistem informasi dalam merancang strategi yang komprehensif.

David (2010) menegaskan bahwa matrik SWOT adalah alat yang dapat digunakan oleh para manajer untuk menyusun strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal. Selajan dengan itu Freddy

Rangkuti menyatakan bahwa unsur internal maupun eksternal perlu dinilai untuk menyusun rencana dengan menerapkan Strategi SO yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, Strategi WO bertujuan mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan Strategi WT berfokus pada meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Pendekatan matriks ini memungkinkan organisasi merancang langkah strategis yang selaras dengan kondisi nyata di lapangan dan mendorong pencapaian kinerja yang optimal.

Latar belakang tersebut menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengkaji strategi yang diterapkan Dinas Sosial dalam penanganan PRSE di Kota Denpasar. Hal ini didasari oleh pentingnya strategi sebagai pedoman dan acuan utama dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan sehingga dapat terlaksana secara optimal dan efisien, serta berhasil meraih sasaran yang diinginkan yaitu untuk memberikan program/kebijakan yang tepat untuk dapat memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dari faktor-faktor yang diamati tanpa membandingkan antar variabel, sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan pengamatan objek secara alamiah. Pemilihan metode ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menggali makna yang mendalam dari strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menangani Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kota Denpasar. Penelitian kualitatif deskriptif dinilai efektif karena memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi informasi berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari narasumber utama melalui observasi dan wawancara mendalam. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), data primer diperoleh dari informan kunci yang memiliki pengetahuan langsung terkait fenomena yang diteliti, seperti pejabat dan staf Dinas Sosial Kota Denpasar serta penerima program PRSE. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, artikel berita, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumentasi lainnya yang relevan untuk memperkuat temuan utama.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Denpasar yang dipilih karena menjadi instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial, termasuk penanganan PRSE. Pemilihan unit analisis ini bertujuan untuk memahami strategi organisasi secara mendalam, sebagaimana dijelaskan oleh Morrison (2007), bahwa unit analisis merupakan elemen yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian ini berfokus pada lingkungan Dinas Sosial Kota Denpasar, karena di tempat inilah kebijakan dan program strategis dirancang dan diimplementasikan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi relevan dan mendalam terhadap topik penelitian. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa teknik ini cocok untuk penelitian kualitatif karena tidak semua individu memiliki pengetahuan yang sama terhadap masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini mencakup pejabat struktural di Dinas Sosial, seperti kepala dinas dan kepala bidang, serta PRSE sebagai penerima langsung program.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun tetap terarah, sebagaimana disarankan oleh Satori dan Komariah (2014), untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap respons informan. Observasi dilakukan secara partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung dalam lingkungan sosial yang diteliti agar memahami situasi secara autentik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi temuan lapangan melalui bahan tertulis atau visual, sesuai dengan pandangan Noor (2011) bahwa dokumentasi dapat memberikan informasi faktual dari suatu kejadian.

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara, alat tulis, serta perangkat digital seperti ponsel untuk merekam data dalam bentuk foto, audio, dan video. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif yang disusun secara sistematis, dan jika perlu dilengkapi dengan tabel atau gambar agar memudahkan pemahaman.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari lapangan agar fokus pada hal-hal relevan yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan visualisasi seperti bagan untuk memperjelas fokus temuan. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sejak awal proses pengumpulan data hingga akhir, dengan membandingkan pola-pola dan merangkai keterkaitan antara data dan teori, guna menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Strategi penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini telah menjalankan pemindaian lingkungan secara aktif dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012. Sasaran program diarahkan kepada perempuan dengan kondisi ekonomi rentan, seperti menjadi tulang punggung keluarga, janda, memiliki pasangan yang sakit atau tidak bekerja. Kekuatan utama strategi ini terletak pada komitmen pemerintah kota dan jaringan koordinasi yang mencakup hingga desa dan kelurahan, serta program pelatihan dan pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi PRSE. Namun, kelemahan muncul dari kurangnya monitoring terhadap keberlanjutan program dan jadwal pelatihan yang tidak konsisten, sehingga menurunkan partisipasi PRSE.

Dalam konteks eksternal, beberapa tantangan yang dihadapi adalah hambatan psikologis seperti rasa malu atau stigma sosial yang menyebabkan PRSE enggan berpartisipasi, serta keterbatasan waktu akibat tanggung jawab pribadi. Selain itu, proses assessment kerap terkendala oleh kurangnya data yang akurat dan keterbukaan masyarakat. Ancaman lainnya mencakup potensi kecemburuan sosial akibat keterbatasan bantuan dan persaingan usaha yang dihadapi PRSE dalam menjalankan bisnis mereka. Meskipun demikian, terdapat peluang dari keterlibatan pihak swasta melalui CSR serta kerja sama dengan perangkat daerah yang memungkinkan cakupan program menjadi lebih luas dan efektif. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, juga memperkuat pelaksanaan program ini.

Dari sisi formulasi strategi, program-program pemberdayaan PRSE yang dilaksanakan telah sejalan dengan visi dan misi Dinas Sosial Kota Denpasar yang menekankan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penegasan dari Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menunjukkan bahwa program yang menasar kelompok PRSE merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, selaras dengan visi Walikota Denpasar.

Implementasi strategi dilakukan dengan pendekatan lintas sektor yang mencakup empat fokus utama, yaitu pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberian bantuan konkret. Bantuan tersebut antara lain berupa pendidikan bagi anak-anak yatim/piatu dari PRSE, bantuan sembako, BLT, dan pelatihan keterampilan seperti tata boga untuk mendukung kemampuan wirausaha PRSE.

Namun, dalam tahap evaluasi dan pengendalian, ditemukan bahwa Dinas Sosial belum melaksanakan evaluasi program secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Evaluasi hanya dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah dan belum terdapat mekanisme pengawasan berkelanjutan yang dapat mengukur sejauh mana PRSE telah berdaya atau masih dalam kondisi kerentanan sosial. Hal ini

menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Keterkaitan dengan Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan peran krusial yang dijalankan oleh manajer atau pemimpin dalam merancang strategi organisasi, yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, sebagaimana dikemukakan oleh Robins dan Coulter (2010). Proses ini mencakup analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi. Selain itu, manajemen strategi juga melibatkan identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Dinas Sosial Kota Denpasar telah melakukan proses manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong rentan seperti Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Adapun keterkaitan dengan proses manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2003), yaitu sebagai berikut:

Pemindaian Lingkungan

Proses pertama yakni pemindaian lingkungan, dimana berfungsi untuk menganalisis lingkungan internal maupun eksternal di dalam suatu organisasi. Menganalisis lingkungan internal adalah proses yang dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, strategi, dan kinerja yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan dengan begitu sebuah organisasi akan mengetahui kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi tersebut. Sedangkan menganalisis lingkungan eksternal merupakan proses memperhitungkan faktor yang berada di luar organisasi sehingga segala peluang dan ancaman yang mungkin terjadi harus diperhitungkan guna membuat keputusan. Keterkaitan antara indikator ini dengan hasil temuan adalah adanya kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan Dinas Sosial Kota Denpasar.

Dinas Sosial Kota Denpasar telah secara aktif mengidentifikasi dan menyesuaikan sasaran program penanganan kemiskinan, khususnya yang menyangkut PRSE. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, sasaran program diarahkan kepada perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi rentan, menjadi tulang punggung keluarga, serta mengalami berbagai kondisi kerentanan sosial lainnya seperti menjadi janda, memiliki pasangan yang sakit, atau tidak bekerja. Kekuatan utama dari strategi ini terletak pada adanya komitmen pemerintah kota, dan jaringan koordinasi hingga ke tingkat desa/kelurahan. Selain itu, keberadaan program-program pelatihan dan pemberdayaan menjadi nilai tambah dalam mendorong perempuan rawan menjadi sosok tangguh secara ekonomi. Kelemahan dari program yang dijalankan oleh Dinas Sosial adalah tidak adanya monitoring yang dilakukan untuk keberlanjutan program, penjadwalan program tidak teratur sehingga menurunkan antusiasme PRSE dalam mengikuti pemberdayaan.

Setelah melakukan analisis lingkungan internal dalam tahap ini juga dilakukan analisis eksternal berupa peluang dan ancaman dalam program ini. Adapun kendala dari lingkungan eksternal yaitu adanya PRSE yang merasa malu atau enggan untuk aktif mengikuti program karena faktor stigma sosial atau kesibukan pribadi dan jadwal program yang tidak pasti yang membuat mereka tidak bisa mengikuti pelatihan secara maksimal. Selain itu, proses *assessment* juga masih menghadapi hambatan, seperti sulitnya memperoleh data yang *data valid dan update*, serta kurangnya keterbukaan dari masyarakat. Kendala lainnya adalah terbatasnya waktu dan fleksibilitas peserta karena tanggung jawab yang harus dijalankan, hingga keterbatasan modal usaha. Kendala ini menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dan inklusif, agar program yang dirancang benar-benar dapat menyentuh kebutuhan nyata PRSE.

Analisis eksternal lainnya yaitu ancaman yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan program yaitu rawan terjadinya konflik mengingat banyaknya kelompok masyarakat rawan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga sering terjadinya kecemburuan antar masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Ancaman juga muncul kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, dari pemberdayaan yang dilakukan ada beberapa yang sudah mampu membuka usaha sendiri namun dalam proses usaha tentu saja terdapat ancaman dari luar seperti banyaknya tempat kuliner sehingga terjadinya persaingan antar pedagang.

Peluang yang terdapat dalam program ini adalah adanya keterlibatan pihak swasta dan stakeholder lain dalam kegiatan ini baik melalui CSR dan pemberian pelatihan, Dinas Sosial juga menjalin kerjasama dengan camat, desa lurah untuk lebih dekat dengan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di tingkat daerah dimana dengan ini dapat mempermudah cakupan Dinas Sosial di wilayah desa/lurah. Tidak hanya itu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi juga merasakan peluang dari program/kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial seperti dapat membuka usahanya sendiri dan terlibat dalam event yang dilakukan di Kota Denpasar. Dan diperkuat dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan baru yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Denpasar dalam PRSE belum sepenuhnya optimal. Dari sisi lingkungan internal, kekuatan utama terletak pada komitmen pemerintah daerah, dan adanya program pelatihan dan jaringan koordinasi hingga tingkat desa/kelurahan. Namun, kelemahan yang signifikan adalah tidak adanya mekanisme monitoring dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan program, yang menjadi hambatan dalam mengukur efektivitas dan dampaknya secara nyata.

Dari sisi lingkungan eksternal, program memiliki peluang besar melalui kolaborasi dengan pihak swasta, pelibatan stakeholder lokal, serta manfaat langsung yang dirasakan PRSE, seperti membuka usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, sejumlah ancaman dan kendala masih menghambat keberhasilan program, seperti stigma sosial, rendahnya partisipasi PRSE, keterbatasan waktu dan modal usaha, serta potensi kecemburuan sosial antar kelompok penerima bantuan. Dengan mempertimbangkan keseluruhan faktor tersebut, maka strategi yang diterapkan dapat dikatakan positif namun belum maksimal. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk perbaikan dalam sistem monitoring, validasi data, dan penguatan pendampingan pascaprogram, agar tujuan pemberdayaan PRSE dapat tercapai secara menyeluruh dan merata.

Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan proses penetapan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Hunger dan Wheelen (2003) menyatakan bahwa formulasi strategi mencakup penentuan misi, perumusan tujuan, pengembangan strategi, serta penetapan arah kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan indikator ini, dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menerapkan strategi penanganan terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi telah sejalan dengan visi dan misi Dinas Sosial yaitu, pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar menyampaikan bahwa program-program yang dijalankan selama ini memang difokuskan untuk menjangkau kelompok rentan, salah satunya PRSE, yang dikategorikan sebagai kelompok yang berada dalam situasi kemiskinan atau rentan terhadap kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial juga menegaskan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan kepada PRSE merupakan bagian dari upaya konkret dalam mendukung visi Walikota Denpasar, khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Dalam analisis hasil temuan indikator formulasi strategi ini sudah terpenuhi dengan baik. Mulai dari visi, misi serta tujuan program yang sudah sesuai dan selaras dengan visi misi serta tujuan dari Dinas Sosial Kota Denpasar yaitu pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan penetapan pedoman kebijakan juga sangat jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial yang didalamnya sudah tertuang jenis layanan yang diberikan.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses yang mencakup seluruh aktivitas serta pemilihan yang diperlukan dalam melaksanakan perencanaan strategi. Implementasi dikatakan sebagai bentuk penerapan dari semua perencanaan strategi yang telah dibuat oleh organisasi sehingga mampu mencapai tujuan. Pengembangan program anggaran serta prosedur termasuk dalam proses implementasi strategi. Berdasarkan hasil temuan peneliti yang berkaitan dengan indikator ini maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Dari uraian diatas, dapat diambil

kesimpulan bahwa pelaksanaan penanganan PRSE di Kota Denpasar meliputi empat fokus utama, yaitu: pendekatan lintas sektor, pemberdayaan sosial, layanan rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pengimplementasian program yang dijalankan Dinas Sosial dilakukan dengan pemberian rehabilitasi sosial kepada PRSE yang memiliki anak yatim/piatu dimana dukungan yang diberikan pemerintah berupa bantuan pendidikan agar anak-anak dari PRSE tidak putus sekolah. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa pemberian bantuan sosial berupa sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian Dinas Sosial juga memberikan Pemberdayaan Sosial dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti tata boga untuk membekali PRSE dengan kemampuan wirausaha. Selain itu adanya pendekatan lintas sektor untuk memperluas cakupan bantuan yang dapat dilakukan.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program ini sudah optimal karena dalam penanganannya Dinas Sosial tidak hanya memberikan pemberdayaan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi tetapi juga memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan pendekatan lintas sektor sehingga kehidupan mereka sudah terjamin ketika berada dalam kondisi rentan.

Evaluasi dan Pengendalian

Tahap selanjutnya setelah implementasi strategi yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Evaluasi tentu sangat diperlukan setelah strategi dilaksanakan, dikarenakan evaluasi sendiri memiliki fungsi ialah mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah strategi. Selain evaluasi terdapat juga pengendalian strategi dimana tahap ini bertujuan agar strategi yang dilakukan dapat terkendali dan dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti yang berkaitan dengan indikator ini maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial dalam menjalankan program-program yang ada hanya melakukan evaluasi melalui Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan satu tahun sekali. Tindakan penanganan dan upaya untuk melakukan monitoring dari kegiatan yang telah dilakukan terhadap PRSE yang mendapatkan program dari Dinas Sosial juga sementara ini belum ada tindak lanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan pengendalian program yang dijalankan oleh Dinas Sosial masih terbatas, yakni hanya dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah yang dilakukan setahun sekali. Selain itu, upaya tindak lanjut dan monitoring terhadap pelaksanaan program bagi PRSE belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi menghambat efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan karena sejauh ini masih belum adanya pendataan secara spesifik perempuan berdaya atau perempuan yang sudah dapat keluar dari kondisi rentan.

3.2.2 Hasil Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan sebuah metode yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merancang strategi bagi suatu organisasi atau perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*), mengatasi kelemahan (*weaknesses*), memanfaatkan peluang (*opportunities*), serta mengantisipasi ancaman (*threats*). Dalam pelaksanaannya, digunakan analisis SWOT menggunakan Matriks SWOT sebagai instrumen analisis yang membantu dalam merumuskan dan menyusun faktor-faktor strategis organisasi secara terstruktur.

Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil temuan, pengamatan dan kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor dalam aspek lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang belum diidentifikasi oleh Dinas Sosial dalam penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan belum teridentifikasi secara optimal oleh Dinas Sosial Kota Denpasar berdasarkan hasil wawancara, pengamatan serta kajian yang telah dilakukan terkait dengan faktor eksternal dan internal pada program yang dimiliki yaitu sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Dukungan melalui CSR

Sumber anggaran memang sangat penting dalam menunjang keberlanjutan dan efektifitas program yang dijalankan dalam penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial mendapatkan dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

2. Memberikan Program layanan sosial yang komprehensif,

Layanan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar bersifat komprehensif dengan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, hingga rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah tidak hanya mengurangi beban hidup PRSE, tetapi juga mendorong mereka menjadi mandiri dan tangguh secara sosial ekonomi.

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia

Aparatur yang memadai dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu menjadi kekuatan dalam menjalankan program-program yang ada guna untuk melakukan penanganan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Sosial berjumlah 134 orang yang terdiri dari ASN dan Non ASN yang terbagi menjadi beberapa bidang.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. PRSE tidak selalu responsif atau aktif dalam program

Keterlibatan PRSE dalam program masih kurang karena stigma sosial yang ada di masyarakat sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam program yang dijalankan pemerintah, dan kesibukan mereka yang berperan ganda baik sebagai kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga menyebabkan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial.

2. Koordinasi antar bidang dalam Dinas Sosial dan stakeholder kadang kurang efektif

Dalam penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas terkait, Desa/Lurah, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta tidak jarang dalam proses penanganan yang akan dilakukan mengalami beberapa kendala di lapangan yang menyebabkan adanya miskomunikasi ataupun keterlambatan dalam pengimplementasian program.

3. Keterbatasan Anggaran dan kapasitas pelatihan

Anggaran yang terbatas menyebabkan pelatihan yang diberikan Dinas Sosial tidak dapat menjangkau semua PRSE yang ada di Kota Denpasar sesuai data PPKS. Keterbatasan kuota pelatihan menyebabkan PRSE yang dapat terlibat langsung dalam program pelatihan hanya perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Denpasar sehingga terjadi ketimpangan antara jumlah PRSE yang ada dengan jumlah PRSE yang mendapatkan pemberdayaan.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta

Kolaborasi dengan pihak swasta merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemberdayaan sosial, khususnya melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, keterlibatan lembaga pelatihan kerja swasta dapat memberikan akses terhadap pelatihan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing kelompok sasaran, sekaligus memperkuat peran serta sektor swasta dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

2. Adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan baru

Adanya kebijakan baru membuka peluang integritas data dan sinergi lintas sektoral, dimana pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2025 yang bertujuan untuk memperkuat

perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Dengan Inpres ini, negara menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan rentan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

3. Keikutsertaan dalam event lokal

Keterlibatan PRSE yang sudah mempunyai usaha sendiri dalam acara-acara di Kota Denpasar untuk mempromosikan dan menjual produk yang mereka hasilkan. Dengan terlibat dalam event-event ini dapat membuka peluang lebih besar untuk PRSE dalam mengembangkan usahanya.

4. Potensi peningkatan ekonomi PRSE melalui usaha mandiri

Program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan tata boga, serta pemberian bantuan yang dilaksanakan Dinas Sosial memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan ekonomi bagi PRSE. Pelatihan yang diberikan bukan saja menambah pengetahuan dan keterampilan mereka, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan bekal pelatihan dan dukungan yang diterima, PRSE memiliki peluang untuk memulai usaha mandiri. Usaha ini berpotensi menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi mereka dan keluarganya.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Potensi konflik sosial akibat kecemburuan dalam distribusi bantuan

Distribusi bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak dapat secara serentak menjangkau seluruh kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), sehingga sering kali menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Ketidaksesuaian antara harapan penerima dan kenyataan di lapangan, terutama jika tidak disertai dengan penjelasan yang memadai dari pihak desa, lurah, atau fasilitator, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang berkembang menjadi konflik sosial. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

2. Persaingan usaha tinggi di sektor UMKM

Setelah menerima pelatihan dan dukungan modal usaha, PRSE didorong untuk memulai usaha mandiri, khususnya di sektor kuliner seperti penjualan makanan atau jajanan. Namun, realitas di lapangan membuktikan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar sangat kompetitif, terutama di bidang kuliner yang mengalami pertumbuhan pesat. Persaingan yang ketat menuntut pelaku usaha PRSE untuk memiliki keunggulan kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang dalam pasar yang dinamis.

3. Rendahnya partisipasi PRSE karena stigma dan larangan keluarga,

Tingkat partisipasi PRSE dalam program pemberdayaan masih tergolong rendah, salah satunya disebabkan oleh adanya stigma sosial serta pembatasan dari lingkungan keluarga. Beberapa PRSE menghadapi penolakan atau larangan dari anggota keluarga, khususnya suami, untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan pemberdayaan. Selain itu, faktor psikososial seperti rasa malu akibat status sebagai janda, perempuan cerai, atau kepala keluarga perempuan turut menjadi hambatan. Stigma ini menjadi penghalang internal yang signifikan dalam proses pemberdayaan, karena tanpa partisipasi aktif, upaya peningkatan kesejahteraan tidak dapat berjalan secara optimal.

4. Minimnya jaminan keberlanjutan program

Keberlanjutan program pemberdayaan PRSE menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian anggaran dan perubahan arah kebijakan pemerintah daerah. Ketiadaan dasar hukum atau regulasi yang kuat menyebabkan program intervensi terhadap kelompok PRSE rentan terhenti seiring dengan pergantian kepemimpinan. Dalam kondisi demikian, kelanjutan program sangat bergantung pada inisiatif

pribadi serta komitmen dari pejabat atau aparatur yang sedang menjabat, sehingga mengurangi efektivitas dan daya dorong program dalam sistem birokrasi jangka panjang.

3.2.3 Perumusan Strategi dan Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis identifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi dalam merumuskan strategi dapat diformulasikan sebagai strategi alternatif. Matriks ini digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi dan sebagai gambaran yang jelas tentang bagaimana peluang, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan yang dihadapi organisasi dan juga menggambarkan alternatif strateginya. Adapun gambaran matriks SWOT dalam penentuan strategi alternatif:

Tabel 4. Matriks Analisis SWOT

IFAS	STRENGTHS (S) 1. Dukungan melalui CSR 2. Memberikan program layanan sosial yang komprehensif 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia	WEAKNESSES (W) 1. PRSE tidak selalu responsif atau aktif dalam program 2. Koordinasi antar bidang dalam Dinas Sosial dan stakeholder kadang kurang efektif 3. Keterbatasan anggaran dan kapasitas pelatihan
OPPORTUNITIES (O) 1. Membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta 2. Adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan baru 3. Keikutsertaan dalam event lokal 4. Potensi peningkatan ekonomi PRSE melalui usaha mandiri	STRATEGI (SO) Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 1. Manfaatkan dukungan CSR untuk menjalin lebih banyak kerja sama dengan lembaga swasta 2. Memaksimalkan program layanan sosial ke dalam kegiatan usaha mandiri 3. Memanfaatkan SDM yang tersedia untuk menyesuaikan dan menjalankan kebijakan nasional terbaru	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang 1. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan pelatihan agar kapasitas peserta pelatihan dapat ditingkatkan 2. Menggunakan momentum kebijakan baru untuk memperkuat koordinasi dan SOP dengan lembaga terkait 3. Meningkatkan partisipasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan terlibat dalam event-event lokal.
THREATS (T) 1. Potensi konflik sosial akibat kecemburuan dalam distribusi bantuan 2. Persaingan usaha tinggi di sektor UMKM 3. Rendahnya partisipasi PRSE karena stigma dan larangan keluarga 4. Minimnya jaminan keberlanjutan program	STRATEGI (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 1. Mengoptimalkan penggunaan dana CSR untuk membangun sistem distribusi bantuan yang transparan dan menghindari konflik sosial 2. Mengoptimalkan pelatihan yang berkualitas terhadap PRSE untuk dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar UMKM 3. Pembinaan kepada PRSE yang menghadapi stigma dan penolakan keluarga dengan melibatkan SDM lokal dan TKSK	STRATEGI (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan menghindari ancaman. 1. Ciptakan pendekatan persuasif berbasis komunitas: melibatkan tokoh masyarakat, kader desa, atau alumni PRSE untuk memberikan edukasi dan testimoni langsung. 2. Bentuk tim koordinasi terpadu lintas bidang dan desa/lurah, yang bertanggung jawab terhadap distribusi bantuan secara terbuka dan terdokumentasi 3. Kembangkan model pelatihan mikro bergilir & berbasis kluster usaha

Tabel 5. Matriks Faktor Strategi Internal

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT (Berdasarkan hasil wawancara)	RETING	BOBOT RETING	X
KEKUATAN:				
1. Dukungan melalui CSR	0,18	5,00	0,88	
2. Memberikan program layanan sosial yang komprehensif	0,15	4,00	0,59	
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia	0,18	5,00	0,88	
KELEMAHAN:				
1. PRSE tidak selalu responsif atau aktif dalam program	0,15	2,00	0,29	
2. Koordinasi antar bidang dalam Dinas Sosial dan stakeholder kadang kurang efektif	0,18	2,00	0,35	
3. Keterbatasan anggaran dan kapasitas pelatihan	0,18	2,00	0,35	
TOTAL	1,00		3,35	

Tabel 6. Matriks Faktor Strategi Eksternal

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT (Berdasarkan hasil wawancara)	RETING	BOBOT RETING	X
PELUANG:				
1. Membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta	0,13	5,00	0,67	
2. Adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan baru	0,11	4,00	0,44	
3. Keikutsertaan dalam event lokal	0,13	5,00	0,67	
4. Potensi peningkatan ekonomi PRSE melalui usaha mandiri	0,13	5,00	0,67	
ANCAMAN:				
1. Potensi konflik sosial akibat kecemburuan dalam distribusi bantuan	0,11	2,00	0,22	
2. Persaingan usaha tinggi di sektor UMKM	0,13	2,00	0,27	
3. Rendahnya partisipasi PRSE karena stigma dan larangan keluarga	0,13	2,00	0,27	
4. Minimnya jaminan keberlanjutan program	0,11	2,00	0,22	
TOTAL	1,00		3,42	

Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT, dapat ditarik empat prioritas strategi yang terbagi menjadi strategi SO (*Strengths -Opportunities*) yaitu pemanfaatan kekuatan untuk meraih peluang, Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) yaitu upaya mengurangi kelemahan guna memaksimalkan peluang, strategi ST (*Strengths -Threats*) yaitu penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman, serta strategi WT (*Weaknesses-Threats*) yaitu mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Berikut penjabaran atas strategi yang dapat penulis rekomendasikan sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan PRSE dan menjadi fokus pengembangan di masa yang akan datang antara lain:

A. Strategi SO (*Strengths Opportunities*)

Melalui analisis terhadap kekuatan dan peluang yang dimiliki, diperoleh sejumlah alternatif strategi. Dari berbagai opsi tersebut, terdapat dua alternatif strategi yang layak diprioritaskan karena mampu mengoptimalkan kekuatan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada (Strategi SO) dalam upaya penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi:

1. Memanfaatkan dukungan CSR untuk menjalin lebih banyak kerjasama dengan lembaga swasta

Strategi ini penulis prioritaskan dengan melihat banyaknya jenis pelayanan yang harus diberikan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengharuskan Dinas Sosial untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanganan ini. Peran serta lembaga swasta dalam meningkatkan kesejahteraan sangat diperlukan oleh pemerintah untuk keberlangsungan program yang dijalankan. Dengan adanya lembaga swasta setidaknya mereka mendapatkan sedikit bantuan untuk keberlangsungan hidupnya.

Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan/program sebagai berikut: Merancang program kemitraan yang terstruktur dengan perusahaan melalui skema CSR, baik untuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan maupun pelatihan lanjutan.

2. Memaksimalkan program layanan sosial ke dalam kegiatan usaha mandiri

Strategi ini menjadi prioritas dengan melihat pentingnya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi untuk dapat membuka usahanya sendiri dalam menopang kehidupannya di masa mendatang. Penanganan PRSE yang dilakukan dengan memberikan pemberdayaan sosial dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan alat usaha agar terciptanya unit usaha nyata.

Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan/program sebagai berikut: Membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) atau koperasi kecil yang bisa menjual produk di event lokal.

B. Strategi WO (*Weakness Opportunities*)

Berdasarkan faktor kelemahan dan peluang yang dimiliki maka dapat menghasilkan alternatif strategi, namun terdapat strategi yang dapat diprioritaskan sehingga mampu meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO) dalam penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yakni Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan pelatihan agar kapasitas peserta pelatihan dapat ditingkatkan

Strategi ini menjadi prioritas dengan mempertimbangkan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendukung penanganan PRSE, khususnya dalam menjamin keberlanjutan program yang dijalankan. Keterlibatan pihak swasta dinilai mampu memperluas jangkauan dan cakupan program pemberdayaan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak PRSE secara efektif.

Penanganan PRSE memerlukan kolaborasi multisektor, karena jika hanya bergantung pada anggaran pemerintah, program yang ada berisiko tidak berkelanjutan dan kurang optimal. Oleh karena itu, sinergi dengan sektor swasta sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan keterampilan, maupun fasilitasi akses pasar, guna memperkuat upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi PRSE secara berkelanjutan.

Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan/program sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif Pengakuan Publik dengan memberikan penghargaan tahunan
 - b. Membentuk Forum Sinergi Sosial dengan memberikan undangan rutin 3 bulanan kepada pihak swasta, LPKS, dan yayasan.
1. Meningkatkan partisipasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan terlibat dalam event-event lokal.

Strategi ini diprioritaskan karena partisipasi aktif PRSE dalam berbagai event lokal di wilayah Kota Denpasar dinilai dapat memberikan peluang strategis bagi mereka untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk hasil usahanya kepada masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan dalam event-

event tersebut tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kapasitas kewirausahaan PRSE dalam menghadapi persaingan pasar.

Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial memiliki potensi memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi PRSE. Partisipasi dalam event lokal menjadi indikator keberhasilan program, sekaligus menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam mendukung upaya penanganan PRSE secara berkelanjutan. Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan/program sebagai berikut: PRSE Expo (Mini Bazar Lokal) dengan menghadirkan stan khusus PRSE pada event Pemkot, car free day, pasar rakyat, atau festival desa dengan menampilkan produk hasil pelatihan.

C. Strategi ST (*Strengths Threats*)

Analisis terhadap faktor kekuatan dan ancaman menghasilkan sejumlah alternatif strategi. Dari berbagai pilihan tersebut, terdapat dua alternatif strategi yang dapat dijadikan prioritas karena mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman (Strategi ST) dalam upaya penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi:

1. Mengoptimalkan penggunaan CSR untuk membangun sistem distribusi bantuan yang transparan dan menghindari konflik sosial

Strategi ini menjadi prioritas karena keberadaan anggaran yang memadai merupakan fondasi utama dalam mendukung efektivitas program penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Pemanfaatan kontribusi dari program Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta dapat mendorong percepatan implementasi program melalui penguatan sistem distribusi bantuan yang transparan dan akuntabel. Distribusi bantuan yang tidak merata atau tidak jelas berpotensi menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dengan sistem distribusi yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat ditingkatkan dan tujuan pemberdayaan sosial dapat tercapai secara lebih efektif.

2. Mengoptimalkan pelatihan yang berkualitas terhadap PRSE untuk dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar UMKM

Peningkatan kualitas pelatihan bagi PRSE merupakan strategi prioritas yang dirancang sebagai respons terhadap tingginya tingkat persaingan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Kota Denpasar. Semakin banyak masyarakat yang memilih jalur wirausaha menyebabkan pasar semakin kompetitif. Dalam konteks ini, PRSE perlu dibekali dengan keterampilan teknis dan manajerial yang mumpuni agar mampu menghasilkan produk atau layanan yang memiliki keunggulan kompetitif. Pelatihan yang dimaksud tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek inovasi produk, pemasaran digital, dan manajemen usaha menjadi kunci agar di tengah ketatnya persaingan PRSE dapat bertahan dan berkembang. Dengan demikian, pelatihan yang berkualitas tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi PRSE, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pelaku usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan/program sebagai berikut:

- a. Pelatihan Pemasaran Digital dengan cara membuat katalog produk digital, memotret produk dengan HP, membuat akun bisnis, dan mengatur promosi online.
- b. Mengadakan kegiatan belajar ke UMKM yang sudah sukses

D. Strategi WT (*Weaknesses Threats*)

Hasil analisis terhadap berbagai kelemahan dan ancaman menghasilkan sejumlah alternatif strategi. Dari alternatif tersebut, terdapat dua strategi prioritas yang dinilai paling efektif untuk meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman, sesuai dengan pendekatan strategi WT, dalam upaya penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi:

1. Mengembangkan model pelatihan mikro bergilir & berbasis klaster usaha

Strategi ini diprioritaskan sebagai upaya untuk mengatasi sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program penanganan PRSE, baik dari sisi internal Dinas Sosial Kota Denpasar maupun dari sisi partisipasi PRSE itu sendiri. Keterbatasan anggaran menyebabkan program yang dijalankan belum dapat menjangkau seluruh sasaran secara berkelanjutan. Sementara itu, dari pihak PRSE, masih terdapat hambatan seperti stigma sosial dan pembatasan dari keluarga yang mengurangi tingkat keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan.

Model pelatihan mikro bergilir dan berbasis klaster usaha dirancang agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi PRSE. Pelatihan dilaksanakan secara bergiliran dalam kelompok kecil, serta diselenggarakan di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peserta, sehingga memudahkan akses dan meningkatkan partisipasi. Selain itu, pelatihan difokuskan pada klaster usaha spesifik seperti kuliner, kerajinan, atau jasa, agar materi lebih fokus dan sesuai minat peserta.

Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan/program sebagai berikut:

- a. Mengadakan program/kegiatan pelatihan mikro keliling dengan melakukan pelatihan di banjar atau di balai desa.
- b. Pelatihan dilakukan berbasis klaster usaha dengan mengelompokkan PRSE berdasarkan minat/usaha yang serupa.

Rekomendasi Strategi

Dari dua belas strategi menurut analisis SWOT dihasilkan empat rekomendasi strategi alternatif yaitu SO, WO, ST, dan WT. Keempat kelompok strategi alternatif ini dapat dijadikan standar minimal dalam merumuskan alternatif strategi yang nantinya akan diambil oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dalam penanganan PRSE. Adapun keempat rekomendasi strategi alternatif tersebut, yaitu:

1. Strategi SO menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu memaksimalkan program layanan sosial ke dalam kegiatan usaha mandiri. Strategi yang dapat dilakukan yaitu membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) atau koperasi kecil yang bisa menjual produk di event lokal, dimana Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan bantuan berupa modal usaha, melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi.
2. Strategi WO meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dengan meningkatkan partisipasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan terlibat dalam event-event lokal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu mengadakan program PRSE Expo (Mini Bazar Lokal) dengan menghadirkan stan khusus PRSE pada event Pemkot, *car free day*, pasar rakyat, atau festival desa.
3. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dengan mengoptimalkan pelatihan yang berkualitas untuk dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar UMKM. Strategi dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan pemasaran digital melalui pembuatan katalog produk digital, memotret produk dengan HP, membuat akun bisnis, dan mengatur promosi online. Selain itu juga dapat dilakukan kegiatan belajar ke UMKM yang sudah sukses sehingga dapat memotivasi dan memberikan pengalaman langsung bagi PRSE untuk terjun dalam usaha.
4. Strategi WT meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, dengan mengembangkan model pelatihan mikro bergilir & berbasis klaster usaha. Strategi yang dapat dilakukan yaitu mengadakan program/kegiatan pelatihan mikro keliling dengan melakukan pelatihan di banjar atau di balai desa dan melakukan pelatihan berbasis klaster usaha dengan mengelompokkan PRSE berdasarkan minat/usaha yang serupa sehingga dapat lebih fokus dan pembinaan pasca pelatihan lebih efektif.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PRSE di Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar sudah dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan melakukan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial. Strategi ini dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintahan, CSR, serta aparat desa dan kelurahan. Program-program yang dijalankan Dinas Sosial telah mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam membantu PRSE mengakses bantuan sosial berupa bantuan sembako, mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial seperti pelatihan keterampilan sehingga mereka mampu memulai usaha kecil secara mandiri. Namun Dinas Sosial masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan program yaitu keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan masih rendahnya partisipasi PRSE akibat stigma atau hambatan keluarga.

Melalui matriks SWOT, telah dirumuskan dua belas strategi yang dikembangkan menjadi empat strategi alternatif utama yaitu Memaksimalkan program layanan sosial ke dalam kegiatan usaha mandiri, meningkatkan partisipasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan terlibat dalam event-event lokal, mengoptimalkan pelatihan yang berkualitas terhadap PRSE untuk dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar UMKM, dan mengembangkan model pelatihan mikro bergilir & berbasis kluster usaha.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PRSE di Kota Denpasar, beberapa saran dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas program yang dijalankan:

1. Dinas Sosial Kota Denpasar disarankan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan dan Pendidikan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar proses pemberdayaan PRSE tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga pemasaran, kesehatan keluarga, dan pendidikan anak.
2. Perlu dikembangkan model pelatihan yang lebih fleksibel dan menjangkau wilayah komunitas, seperti pelatihan mikro bergilir dan berbasis kluster usaha, agar PRSE yang memiliki keterbatasan waktu dan tanggung jawab rumah tangga tetap bisa terlibat secara aktif dan sesuai dengan minat mereka
3. Pemerintah daerah bersama Dinas Sosial dapat menginisiasi platform promosi dan pemasaran produk PRSE, baik melalui event lokal, media sosial, maupun kerja sama dengan *e-commerce*, sehingga hasil pelatihan bisa berlanjut menjadi sumber pendapatan yang nyata.
4. Perlu dilakukan evaluasi dampak program secara berkala dan berbasis data, tidak hanya dari segi kuantitas (jumlah peserta), tetapi juga kualitas (peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, atau perubahan sosial dalam keluarga PRSE).
5. Dinas Sosial dapat memperluas kolaborasi dengan sektor swasta melalui pendekatan yang sistematis dan terbuka, seperti forum kemitraan sosial rutin, untuk meningkatkan dukungan terhadap pelatihan dan pemberdayaan PRSE secara berkelanjutan.
6. Penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, agar stigma terhadap perempuan janda, kepala keluarga, atau miskin dapat dikurangi, sehingga PRSE lebih percaya diri dan didukung oleh lingkungan dalam mengikuti program pemberdayaan.

Dengan penerapan strategi dan rekomendasi yang tepat, program ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam menjadikan Kota Denpasar sebagai daerah yang memiliki masyarakat yang sejahtera.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). Jumlah Penduduk Miskin Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2021-2023. <https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses pada 28 April 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen), 2021-2023. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk5lzl=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses pada 29 April 2024.
- David, F. R. (2010). *Strategic Management: Concepts and Cases* (Edisi ke-13, hlm. 158, 324). Boston, MA: Prentice Hall.
- Dinas Sosial Kota Denpasar. (2025). Tugas Pokok dan Fungsi. <https://www.sosial.denpasarkota.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada 9 Februari 2025.
- Dirgantoro, C. (2001). *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo.
- Fadlullah, A. (2018). Pemberdayaan perempuan sebagai strategi pembangunan komunitas berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(3), 45–58.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Strategi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Galavan, R. (2014). *Doing Business Strategy*. NuBooks.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Essentials of Strategic Management*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- J. David Hunger, T. L. (1996). *Strategic Management*. American: Addison Wesley Publishing.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Purnama, A. (2018). Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4). Retrieved December 7, 2021, from ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1558/888
- Rangkuti, F. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hlm. 225). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Manajemen Modern untuk Sektor Publik* (hlm. 3). Yogyakarta: Balairung.
- Taufiqurokhman, T. (2016). *Mengenal Manajemen Strategik* (Cetakan pertama). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial